

FUNGSI KELOMPOK USAHA DALAM KEGIATAN EKONOMI PASCA BENCANA DI PANGANDARAN

Trie Agustiyo

Indonesia CS Improvement Specialis
Jalan Teuku Umar Km 46 Cikarang Barat, Bekasi
E-mail: trie.agustiyo@sea.ccamatil.com

Abstrak

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006 menyebabkan 202 toko dan kios cenderamata hancur. Nilai kerugian bangunan dan modal usaha mencapai 9,8 miliar Rupiah. Himpunan Pengrajin Pangandaran (HPP) sebagai salah bentuk implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pangandaran (PPNP) telah dijalankan sejak tahun 2007 memberikan perhatian kepada pengembangan usaha kerajinan Pangandaran. Kelompok tersebut merupakan bentuk perencanaan bottom-up yang memberdayakan masyarakat, sehingga perencanaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dan sejauh apa fungsi HPP bagi pemulihan usaha anggotanya. Fungsi yang dimaksud meliputi fungsi tanggap darurat, pengorganisasian, produksi, pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas. Sampai saat ini peran yang paling menonjol oleh HPP hanya terbatas pada pengorganisasian saja. Kuatnya pengorganisasian yang ada di HPP ini tidak diikuti dengan strategi pengembangan usaha dan kelompok yang baik. Oleh karena itu, HPP perlu meningkatkan daya kompetitif melalui perluasan pemasaran, pencarian alternatif pemasok bahan baku, inovasi secara kolektif, perbaikan hubungan dengan Disperindag dan Kelompok Studi dan Pengembangan Institusi (KSPI) dan menjadi kekuatan pengembangan ekonomi lokal di Pangandaran.

Kata kunci: Tsunami, Himpunan Pengrajin Pangandaran (HPP), Pangandaran, fungsi HPP

Abstract

Events of the earthquake and tsunami that hit Pangandaran on July 17, 2006 led to 202 shops and souvenir stalls were destroyed. The value of buildings and capital losses reached 9.8 billion Rupiah. Pangandaran Craftsmen Association (HPP) as one form of implementation of the Fisherman's Empowerment Program Pangandaran (PPNP) has been run since 2007 to give attention to the development of Pangandaran craft. The group is a form of bottom-up planning that empowers people so that planning can be directed according to community needs. This study aims to see how and to what extent the function of HPP for the recovery of its members. Functions would include emergency response functions, organization, production, financing, marketing and capacity building. Until now the most prominent role by HPP is limited to organizing it. Strong organization at HPP is not followed by the business development strategy and a good group. HPP therefore need to increase the competitive power through the expansion of marketing, the search for alternative suppliers of raw materials, collective innovation, and improved relations with Disperindag KSPI and the strength of local economic development in Pangandaran.

Keywords: Tsunami, Himpunan Pengrajin Pangandaran (HPP), Pangandaran, HPP function

1. Pendahuluan

Indonesia kembali dilanda gempa bumi tektonik yang diikuti oleh tsunami dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada tanggal 17 Juli tahun 2006. BMKG mencatat bahwa pusat

gempa berada pada posisi 9,46° LS-107,19 ° BT di laut sejauh 286 km selatan Bandung pada kedalaman 33 km. Kawasan di sepanjang pantai selatan mulai dari Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat sampai dengan pantai selatan Provinsi Yogyakarta mengalami

dampak kerusakan cukup parah. Pangandaran merupakan kawasan yang paling parah diterjang gelombang tsunami. Berdasarkan data dari Pos Komando Bencana Pangandaran, gempa dan tsunami tersebut ditaksir menimbulkan kerugian material masyarakat Kabupaten Ciamis, kurang lebih mencapai Rp 500 miliar.

Bencana merupakan peristiwa yang menghasilkan kerusakan. Namun hal yang wajib dilakukan adalah pemulihan dari situasi tersebut. Terdapat dua klasifikasi Kegiatan Pasca bencana (*Post Disaster Activities*) (Warfield, 2007). Pertama adalah Kegiatan Pasca bencana Jangka Pendek (*Short Term Post Disaster Activities*). Kegiatan ini merupakan bentuk tanggap darurat (*emergency response*) dari dampak bencana yang ada. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penyediaan *temporary shelter*, makanan, pertolongan dan perawatan pertama serta hunian semi permanen. Sementara Kegiatan Pasca bencana Jangka Panjang (*Long Term Disaster Activities*) merupakan bentuk kegiatan yang berusaha untuk mengembalikan seluruh aspek ke kondisi awal atau kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Kegiatan ini meliputi pemulihan sistem yang penting bagi kehidupan (*vital life-support systems*) seperti pendidikan, kesehatan dan pemulihan sektor ekonomi (Warfield, 2007).

Masyarakat pada kondisi *post disaster* sering mengalami perasaan *treated unequally*, *discriminated*, atau *disengaged*. Putnam berpendapat bahwa pemerintah masih diperlukan dalam kondisi krisis ini (Alfirdaus, 2007). Pada kondisi pasca bencana sebenarnya diperlukan suatu koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.

Program Pemberdayaan Nelayan Pangandaran (PPNP) adalah salah satu program pemulihan pasca bencana yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik saja. PPNP merupakan program untuk mengembangkan sektor ekonomi di Pangandaran setelah mengalami keterpurukan akibat bencana. Walaupun bernama Program Pemberdayaan Nelayan Pangandaran, namun fokus PPNP bukan hanya melibatkan sektor perikanan. PPNP mencakup berbagai sektor ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Pangandaran seperti pariwisata, perdagangan dan pertanian.

HPP sebagai salah satu bentuk implementasi PPNP telah dijalankan sejak tahun 2007. PPNP melatarbelakangi terbentuknya beberapa kelompok usaha yang membantu dalam pemulihan ekonomi. Jejaring sosial antar anggota yang terbentuk merupakan suatu hasil interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Interaksi yang terjadi antar anggota menunjukkan peran aktif anggota dalam kelompok serta hubungan mutualisme yang terbentuk sebagai implikasi dari status keanggotaan yang dimiliki.

Keterlibatan pengrajin dalam HPP diharapkan dapat menstimulus proses pemulihan usaha. Setidaknya terdapat 6 fungsi yang dijalankan oleh kelompok dalam pemulihan ekonomi, yaitu fungsi tanggap darurat, fungsi pengorganisasian, fungsi produksi, fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi peningkatan kapasitas. Pada setiap fungsi tersebut terdapat kegiatan-kegiatan penting terkait dengan kegiatan ekonomi pasca bencana. Kelompok memiliki keterlibatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Keterlibatan kelompok dalam kegiatan tersebut dapat sebagai inisiator, koordinator ataupun keduanya.

Keberadaan kelompok akan membuat kegiatan ekonomi pasca bencana dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, anggota memiliki kekuatan sebagai suatu entitas yang dapat dibawa ke pemerintah dan berbagai pihak luar sehingga mereka akan lebih didengar daripada dilakukan secara perorangan. Dengan kata lain, posisi tawar pengusaha menjadi lebih kuat jika tergabung ke dalam suatu anggota. Keberadaan kelompok juga dapat mempererat rasa kekeluargaan dan solidaritas di antara anggota. Intensitas pertemuan dan interaksi di dalam kelompok membuat rasa kekeluargaan dan solidaritas itu ada. Namun sampai saat ini belum ada kajian tentang fungsi kelompok dalam usaha pemulihan usaha pasca bencana. Belum ada kajian yang sistematis dengan baik. Selain itu, pengetahuan yang ada pun masih parsial dan perlu disusun secara seksama.

HPP sebagai kelompok usaha kerajinan telah melakukan berbagai usaha untuk memulihkan usaha kerajinan Pangandaran. Namun, apa yang telah dilakukan oleh HPP belum dapat dikatakan memberikan pengaruh terhadap anggotanya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian khusus untuk melihat bagaimana dan sejauh apa fungsi HPP bagi pemulihan usaha anggotanya. Hasil dari kajian ini merupakan refleksi kecil dari bagaimana kelompok usaha menjalankan fungsinya dan terlibat dalam penguatan sosial dan kegiatan ekonomi usaha yang hancur akibat bencana.

2. Kelompok Usaha Mikro dan Pemulihan Pasca Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka yang dimaksud usaha mikro memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha mikro adalah merupakan usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*) (World Bank dalam Hallen Kristin (2000)). Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat *survival* yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil. Ekonomi mikro sebenarnya sudah sejak lama menjadi tulang punggung masyarakat kita (Ratnasari, 2009).

Pada usaha mikro, beberapa kesulitan yang sering ditemui adalah pada aspek pemodal dan pengembangan usaha. Kesulitan untuk mendapatkan bantuan kredit seringkali ditemui karena usaha yang mereka dirikan biasanya tidak berbadan hukum. Selain itu usaha sering berjalan di tempat karena pelaku usaha mikro tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis. Kedua hal inilah yang membuat pelaku usaha mikro sulit berkembang dan maju.

2.1 Kegiatan Kelompok Usaha dalam Upaya Pemulihan Pasca Bencana

Suatu kelompok dinilai dapat memiliki fungsi dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Pada setiap kegiatan, kelompok memberikan kontribusi yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok adalah bentuk konkret dari fungsi yang dimiliki oleh kelompok dalam pemulihan usaha. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh

kelompok dalam pemulihan usaha pasca bencana:

a. Penyelamatan aset

Penyelamatan aset yang dimaksud adalah beberapa saat bencana selesai atau berlangsung maka terdapat penyelamatan terhadap aset usaha yang ada di kawasan bencana. Aset yang dimaksud meliputi alat-alat produksi, bahan baku, stok barang dan surat-surat berharga yang dimiliki pengusaha. Kelompok dapat berfungsi dalam kegiatan ini jika kelompok sudah terbentuk sebelum bencana terjadi.

b. Pendataan aset

Kegiatan ini dapat dilakukan ketika bencana telah selesai/sedang berlangsung. Kelompok mengkoordinir anggotanya untuk melakukan pendataan aset yang hilang. Data ini dapat digunakan untuk menghitung besar kerugian yang diderita dan dapat menentukan hal-hal apa yang diperlukan untuk membangkitkan usaha para anggotanya.

c. Pelaporan 100 aset

Saat pasca bencana, maka terdapat banyak pihak yang mengulurkan bantuan serta pertolongan. Bantuan dan pertolongan tersebut mencakup untuk memulihkan sektor ekonomi di kawasan pasca bencana. Ketika terdapat pihak luar (pemerintah, NGO, dan sebagainya) yang ingin memberikan bantuan maka pada awalnya pihak luar tersebut membutuhkan data dan informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh korban bencana. Kelompok dapat memberikan data dan informasi tentang kebutuhan pengusaha dalam masa pemulihan, termasuk melaporkan aset yang hilang dan/atau rusak kepada pihak luar tersebut.

d. Kegiatan bersama

Kelompok dapat mempererat hubungan yang ada antara sesama pengusaha dengan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatan tersebut meliputi operasi bersih,

arisan, dan sebagainya. Anggota dapat mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut seperti dapat menambah jaringan, ajang silaturahmi, dan kepedulian satu sama lain.

e. Pemilihan ketua dan penyusunan anggaran dasar

Dalam setiap organisasi dibutuhkan suatu ketua untuk memimpin kelompok dan mengambil keputusan. Pemimpin dipilih secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota. Keterlibatan pihak luar dalam memengaruhi pemilihan sosok ketua perlu diminimalisasi dan tidak mengintervensi pemilihan ketua. Penyusunan Anggaran Dasar perlu melibatkan partisipasi anggota agar landasan organisasi dipahami bukan hanya oleh pengurus namun juga oleh setiap anggota.

f. Pencarian tempat produksi dan tempat berjualan

Kejadian bencana yang terjadi dapat merusak tempat produksi yang dimiliki oleh pengusaha. Tempat produksi yang dimiliki oleh pengusaha kecil biasanya adalah tempat tinggalnya sendiri. Kelompok dapat bekerja sama dengan pihak luar serta mengkoordinir anggota untuk dapat memperbaiki tempat produksi atau memberikan alternatif tempat bagi usaha. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah lokalisasi atau pemukiman tempat berjualan pagi para pengusaha.

g. Pembaharuan alat produksi

Kelompok dapat mengerahkan potensi yang dimiliki dengan memberikan jalan keluar bagi anggota untuk mendapatkan peralatan dan perlengkapan produksi.

h. Pencarian bahan baku

Kelompok dapat mengkoordinir pembelian bahan baku yang dibutuhkan pengusaha mikro

agar mendapat harga beli yang lebih murah jika dilakukan secara kolektif.

i. Perolehan tenaga kerja

Kelompok dapat memberikan jalan keluar bagi anggota untuk menemukan tenaga kerja yang berketerampilan. Rekomendasi tentang tenaga kerja dapat diperoleh anggota dari kelompok.

j. Perolehan pinjaman lunak

Anggota mendapatkan informasi tentang pencarian pinjaman lunak yang diberikan pihak luar seperti Bank, lembaga keuangan tertentu, dan sebagainya. Kelompok juga dapat mencarikan pinjaman lunak bagi anggota. Kelompok juga dapat mencarikan pinjaman lunak bagi anggota. Pinjaman lunak yang dimaksud adalah bentuk uang yang diberikan oleh pihak luar dan penerima uang diharuskan untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut dengan nilai bunga yang ditetapkan.

k. Pencarian investor

Anggota mendapatkan informasi tentang investor yang akan menanamkan investasi ke sektor kerajinan. Kelompok juga mengkoordinasikan investasi yang masuk kepada anggota.

l. Perolehan pembeli luar kawasan bencana

Kejadian bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi. Kejadian pasca bencana selalu diikuti dengan berkurangnya jumlah pembeli. Produsen harus dapat mencari pasar selain dari kawasan bencana itu sendiri.

m. Keikutsertaan dalam bazaar/pameran

Kelompok dapat memberikan informasi tentang bazaar dan pameran yang diadakan baik di dalam maupun luar negeri. Pameran/bazaar ini dapat digunakan untuk ajang promosi serta penjualan.

n. Pelatihan manajemen bisnis

Pelaku usaha mikro mayoritas memiliki pengetahuan tentang manajemen dan bisnis. Padahal untuk menghadapi tantangan pasar global, pengetahuan tersebut sangat menunjang keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen bisnis untuk menunjang keahlian mereka di dalam pengelolaan bisnis.

o. Inovasi produk

Dalam sektor kerajinan, inovasi produk diperlukan untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan segar. Kelompok dapat menginisiasikan ide-ide inovasi tersebut.

p. Perluasan usaha

Setiap pengusaha pasti menginginkan untuk memperbesar skala usahanya. Perluasan usaha ini terbagi dalam dua hal, yaitu ekstensifikasi usaha dan intensifikasi usaha. Ekstensifikasi usaha yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah tempat berjualan di beberapa lokasi. Sementara intensifikasi usaha yang dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk.

2.2 Konsep Fungsi Kelompok Usaha Mikro

Menurut Komarudin dalam buku Ensiklopedia Manajemen (1994; 768) mengungkapkan definisi fungsi sebagai berikut: kegunaan; pekerjaan atau jabatan; tindakan atau kegiatan perilaku; kategori bagi aktivitas-aktivitas.

Definisi fungsi dalam penelitian ini adalah bagaimana kelompok, dalam hal ini HPP, memberikan suatu kegunaan bagi anggotanya dengan melakukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan posisi HPP di anggota, KSPI dan masyarakat. Pada kegiatan ekonomi pasca bencana setidaknya terdapat 6 fase yang harus dilalui yaitu fase titik awal, fase operasional, fase finansial dan fase manajerial.

a. Fase awal

Pada fase ini, kelompok usaha berpotensi untuk menjalankan fungsi tanggap daruratnya serta fungsi pengorganisasian. Sebagai catatan bahwa fungsi tanggap darurat dapat dilakukan jika kelompok sudah terbentuk sebelum bencana terjadi. Namun dalam beberapa kasus, kelompok terbentuk setelah bencana terjadi. Pada kasus ini fungsi tanggap darurat tidak dapat dijalankan. Kelompok langsung memainkan fungsi yang lain yaitu fungsi pengorganisasian. Pada fase ini mulai dibentuk pengurus kelompoknya dengan memilih ketua terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan penyusunan anggaran dasar. Pengorganisasian yang berkelanjutan akan terlihat ketika terdapat kegiatan bersama yang dijalankan secara rutin.

b. Fase operasional

Fungsi kelompok usaha yang meliputi fungsi produksi, fungsi finansial, dan pemasaran termasuk ke dalam fase ini. Fase ini merupakan fase dimana kelompok mulai masuk ke dalam aspek detail dalam usaha. Pemulihan proses produksi dengan menyediakan tempat produksi, tempat berjualan, alat produksi, bahan baku dan penyediaan tenaga kerja menjadi perhatian dalam pemulihan ini. Proses pinjaman lunak serta investor merupakan hal yang juga menjadi fokus dalam fase ini. Pemulihan pemasaran difokuskan kepada pemasaran di luar kawasan pasca bencana. Ketergantungan akan pasar lokal menyebabkan hasil produksi memiliki kerentanan yang tinggi akan bencana.

c. Fase pengembangan

Fungsi peningkatan kapabilitas seperti pelatihan manajemen bisnis, inovasi produk dan perluasan usaha termasuk ke dalam fase ini. Fase Pengembangan adalah fase yang menentukan apakah pengrajin mampu untuk keluar dari zona aman selama ini. Pelatihan

manajemen bisnis akan membuat pengrajin menjadi sadar akan arti penting pengelolaan bahan baku, pengelolaan tenaga kerja serta aliran uang yang dikeluarkan selama ini. Inovasi produk akan membuat pengrajin tertantang untuk tidak selalu bergantung dari hasil karya ajaran keluarga mereka.

3. Fungsi Kelompok Usaha dalam Kegiatan Ekonomi Pasca Bencana

3.1 Fungsi Keorganisasian

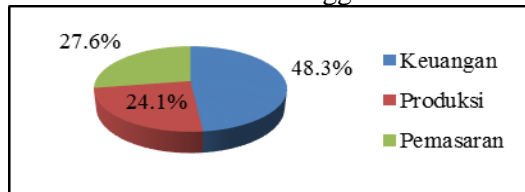
Pada fungsi ini, HPP melakukan 4 buah kegiatan yaitu pertemuan anggota, operasi bersih, penyusunan anggaran dasar dan pemilihan ketua. Berikut adalah paparan lebih lanjut mengenai kedua kegiatan tersebut.

1. Pertemuan Anggota

Pertemuan anggota merupakan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan paling tidak selama 3 minggu sekali. Pertemuan anggota biasanya dilakukan di Balai Desa dengan penanggung jawabnya adalah ketua HPP sendiri. Tingkat kehadiran anggota di pertemuan anggota dapat dikatakan baik. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pertemuan anggota menunjukkan tingkat kesadaran anggota untuk berorganisasi.

Permasalahan “Pemasaran” merupakan permasalahan dianggap mendesak bagi sebagian pengrajin anggota HPP, sebanyak 27,6 %. Permasalahan pemasaran adalah hal yang mulai dirasa mendesak setelah kejadian tsunami melanda. Sebelum tsunami, mayoritas penjualan hasil kerajinan hanya bergantung pada wisatawan yang datang ke Pangandaran. Ketika bencana tsunami terjadi dan pariwisata Pangandaran anjlok, maka pengrajin juga terkena imbasnya. Oleh karena itu pemasaran juga menjadi perhatian bagi HPP saat ini.

Gambar 1
Permasalahan yang Sering Dibicarakan dalam
Pertemuan Anggota



Sumber: Hasil Analisis, 2010

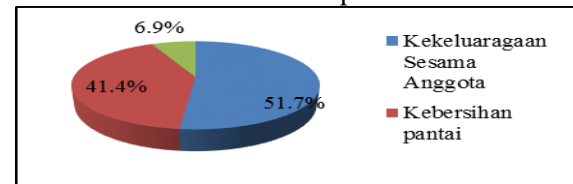
Selain itu juga, ada permasalahan “Produksi” yang dikeluhkan oleh 24,14% anggota. Permasalahan produksi yang sering dikeluhkan terutama adalah terkait hak cipta dari produk yang dihasilkan. Perlu diketahui bahwa kerajinan merupakan karya yang sangat lekat dengan ide dan gagasan seseorang. Untuk membuat suatu produk yang baru dan inovatif menguras tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Sayangnya, ketika produk baru tersebut dijual sang pemilik ide dan laku terjual, maka pengrajin lain dengan mudahnya meniru produk tersebut. Permasalahan ini pernah dibicarakan dalam pertemuan anggota namun kurang dapat diselesaikan secara baik. HPP tidak dapat melarang anggota untuk hanya memproduksi produk-produk tertentu karena kebanyakan dari pengrajin Pangandaran menghasilkan produk yang sedang *trend* atau sesuai pesanan.

2. Operasi bersih

Kegiatan Operasi bersih (opsi) merupakan kegiatan yang dilakukan bersama di antara anggota, yaitu melakukan kegiatan pembersihan di tepi pantai Pangandaran. Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan ini tergolong cukup tinggi (17,2% responden menyatakan sangat sering, 34,5% responden menyatakan sering, 27,6% menyatakan cukup sering, 20,7% menyatakan jarang). Tingginya partisipasi anggota dalam kegiatan opsi dikarenakan para anggota merasakan manfaat langsung dari kegiatan opsi. Berikut adalah gambar yang memperlihatkan beberapa

manfaat opsi yang dirasakan oleh anggota HPP.

Gambar 2
Manfaat Opsi



Sumber: Hasil Analisis, 2010

3. Penyusunan anggaran dasar

Anggaran Dasar merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi. Dalam anggaran dasar akan diatur azas dan tujuan organisasi serta apa saja hak dan kewajiban dari anggota dan pengurus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anggaran dasar HPP sudah dilegalkan secara hukum. Pengesahan HPP secara hukum ini dibantu oleh KSPI. KSPI membantu dalam memberikan dana untuk pembiayaan pengurusan di notaris serta membantu pengarah arah pengembangan HPP dalam anggaran dasar. Tujuan pengesahan HPP secara legal ini agar membuka kesempatan bagi HPP dan pengrajin yang tergabung di dalamnya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak luar.

4. Pemilihan ketua

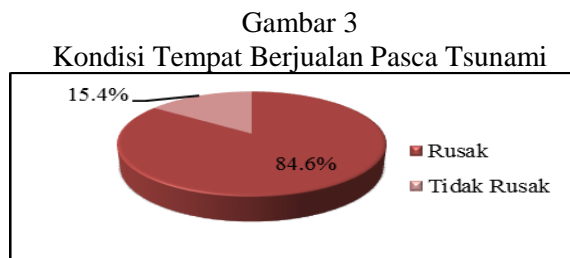
Survei menunjukkan bahwa 84,6 % anggota mengikuti pemilihan ketua. Persentase yang tinggi ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Sebanyak 80,8 % Anggota menyatakan bahwa kegiatan pemilihan ketua dilakukan secara “Sangat Demokratis” tanpa pengaruh dari pihak luar. Calon-calon yang datang diusulkan oleh anggota dan cara pemilihan dirembukkan terlebih dahulu. Pada akhirnya pemilihan ketua dilakukan secara pemungutan suara dengan ketua terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

3.2 Fungsi Produksi

Untuk fungsi produksi, kelompok dapat melakukan lima kegiatan yaitu pencarian tempat produksi, pencarian tempat berjualan, pembaharuan alat produksi, perolehan bahan baku serta perolehan tenaga kerja.

a. Pencarian tempat produksi dan tempat berjualan

Sebanyak 84,6 % anggota menyatakan mengalami kerusakan tempat berjualan (Gambar 3). Tempat berjualan yang hancur dan rusak menimbulkan kerugian karena banyak produk-produk yang hilang. Setelah terjadi bencana tsunami, banyak masyarakat yang secara sepihak mengambil hasil-hasil kerajinan yang terhempas di sekitar pantai akibat tsunami dan menjualnya. Hal ini menyulitkan pengrajin untuk mengumpulkan hasil kerajinan yang mereka jual kembali.



Sumber: Hasil Analisis, 2010

HPP belum memiliki fungsi untuk memberikan bantuan terhadap pengrajin yang mengalami kerugian akibat kerusakan tempat produksi dan/atau tempat berjualan karena pada saat itu HPP belum berjalan secara fungsional. Bantuan terhadap tempat produksi dan/atau tempat berjualan bagi pengrajin mayoritas diberikan oleh Pemerintah.

b. Pembaharuan Alat Produksi

Alat produksi pengrajin kebanyakan berada di tempat produksi walaupun juga ada beberapa pengrajin yang menaruh beberapa alat produksi di tempat berjualan dekat pantai. Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 76,9 %

anggota yang tidak mengalami kerusakan alat produksi. Tidak ada fungsi HPP dalam pembaharuan alat produksi. Anggota yang membutuhkan alat produksi sebagian besar harus mengupayakan sendiri untuk mendapatkan alat produksi. Sebenarnya ada bantuan dari pemerintah berupa bantuan alat seperti kompresor, bor, dan sagola.

c. Perolehan bahan baku

Akibat terjadinya tsunami pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Ciamis pada saat ini melakukan pelarangan pengambilan kerang dan pasir di daerah sekitar pantai, terutama daerah cagar alam dan pantai pasir putih. Padahal sebelumnya, pengrajin dapat memanfaatkan hasil laut di tempat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian daerah pantai dan menjaga ketahanan kawasan Pangandaran.

Saat ini seluruh pengrajin anggota HPP mengupayakan bahan baku sendiri. Bahan baku yang digunakan oleh pengrajin Pangandaran, terutama pengrajin kerang, tidak hanya menggunakan bahan baku dari Pangandaran namun juga dari pemasok luar daerah seperti Madura dan Banyuwangi (Jawa Timur). Kerang yang berasal dari Jawa Timur memiliki variasi yang beragam dan banyak digunakan oleh pengrajin Pangandaran. Selain berhubungan langsung dengan pemasok dari Jawa Timur, pemesanan dari pengrajin biasanya dapat dibeli di Grosir kerang yang dikelola oleh anggota HPP juga.

d. Perolehan tenaga kerja

Tidak semua pengrajin Pangandaran membutuhkan tenaga kerja. Masih ada beberapa pengrajin yang berkarya sendiri. Para pengrajin yang melakukan penambahan tenaga kerja juga tidak menjadikan mereka pekerja tetap. Pekerja tambahan akan diperlukan oleh pengrajin ketika terdapat pesanan ataupun

menjelang musim puncak liburan di Pangandaran. Sementara itu seluruh anggota bukan korban bencana menyatakan tidak memiliki dan membutuhkan pekerja tambahan.

Tidak ada kontribusi HPP yang dilakukan untuk membantu anggota mendapatkan tenaga kerja walaupun 53,8% anggota membutuhkan pekerja tambahan. Setiap anggota mendapatkan pekerja dengan mencari sendiri. HPP belum memiliki keterlibatan dalam perolehan tenaga kerja dari anggota karena setiap anggota memiliki kriteria sendiri dalam memilih tenaga kerja dan sebanyak 78,6% menyatakan merekrut dari teman dan kerabat.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi alasan mengapa HPP tidak memiliki kontribusi dalam kegiatan ini:

1. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anggota menambah jumlah pekerja jika terdapat pesanan dalam jumlah besar dan menjelang puncak liburan. Pesanan yang datang dari pihak luar selama ini tidak melalui HPP namun langsung ke anggota. Oleh karena itu HPP kurang mengetahui kapan anggota membutuhkan tenaga kerja.
2. Walaupun pengrajin di Pangandaran sebenarnya mampu untuk mengerjakan segala bentuk kerajinan laut, namun tetap setiap anggota memiliki keahlian khusus dalam membuat beberapa kerajinan. Ketika terdapat pesanan yang tidak sanggup untuk diterima oleh seorang anggota maka biasanya anggota tersebut mengajak anggota pengrajin yang lain, terutama yang sesuai dengan keahliannya, untuk bersama-sama mengerjakan pesanan tersebut. Lebih lanjut lagi bahkan anggota tersebut dapat memberikan pesanan tersebut kepada anggota pengrajin lain. Mekanisme ini telah berjalan di

Pangandaran dan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi pengrajin Pangandaran.

3. Tidak semua anggota adalah pengrajin kerang. Terdapat pula pengrajin *fiber*, kayu dan layangan. Perbedaan ini membuat pengurus HPP yang seluruhnya adalah pengrajin kerang tidak familiar dengan cara kerja jenis pengrajin lain. Oleh karena itu pengrajin non-kerang lebih memilih untuk melakukan perekrutan tenaga kerja tersendiri agar mendapatkan tenaga terampil yang lebih dipercaya.

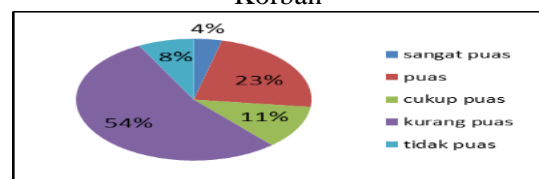
3.3 Fungsi Pembiayaan

Dalam fungsi pembiayaan, maka terdapat 2 kegiatan yang dapat dilakukan oleh HPP yaitu:

a. Perolehan Pinjaman Lunak

Pada dasarnya anggota HPP memiliki banyak cara untuk mendapatkan pinjaman lunak. Salah satunya, anggota dapat meminjam dana kepada KSPI melalui HPP. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa KSPI mendapatkan dana hibah dari Tanoto Foundation yang digunakan untuk memulihkan sektor ekonomi di Pangandaran. Dana tersebutlah yang digunakan untuk pinjaman kepada para pengrajin. Pengrajin mendapatkan dana tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha. Akan tetapi, tingkat kepuasan anggota terhadap pinjaman lunak yang difasilitasi oleh HPP masih kurang (Gambar 4).

Gambar 4
Tingkat Kepuasan Pinjaman Lunak Anggota Korban



Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dapat dilihat bahwa 73,1 % anggota cenderung mengungkapkan kekurangpuasan terhadap pemberian pinjaman. Alasan anggota

menyatakan kekurangpuasannya karena besaran pinjaman yang sebenarnya tidak mampu menutupi ongkos produksi serta tingginya bunga pinjaman sebesar 3 % per bulan yang lebih tinggi daripada bunga bank. Sementara itu sebesar 100% anggota non-korban menyatakan “Puas” terhadap bantuan pinjaman lunak yang diberikan. Perbedaan tingkat kepuasan ini merupakan refleksi dari skala usaha yang dimiliki oleh anggota. Walaupun anggota bukan korban membutuhkan dana yang besar sebagai *start-up* bisnisnya namun anggota bukan korban tidak menuntut terlalu banyak dari HPP dan variasi produk yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Anggota korban memiliki variasi produk yang lebih beragam sehingga membutuhkan pinjaman yang lebih besar untuk membeli bahan baku.

Sementara untuk mengakses dana tersebut, anggota mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Sebanyak 38,5 % anggota mendapatkan informasi mengakses dana pinjaman lain dari keluarga dan kerabatnya. 23,1 % anggota mendapatkan informasi dari pengrajin sesama anggota HPP. Masing-masing 19,2% dan 15,4% anggota mendapatkan informasi dari usaha sendiri dan penawaran bank. 3,8 % anggota mendapatkan informasi dari pemerintah.

b. Perolehan Investor

Belum ada investor yang melirik usaha kerajinan Pangandaran sebagai usaha yang menguntungkan. Sampai saat ini pembiayaan untuk usaha kerajinan di Pangandaran masih mengandalkan dana pinjaman dari berbagai pihak. Belum ada usaha dari pengrajin untuk mencoba mendapatkan investor yang mau menanamkan modal pada usaha kerajinan Pangandaran.

Investor pun kurang melirik sektor kerajinan untuk dijadikan objek investasi karena pemasaran sektor kerajinan hanya mengandalkan pasar lokal saja. Lebih dari itu, pengrajin Pangandaran belum memiliki wacana untuk mengembangkan usaha mereka dengan jalur investor. Karena belum ada wacana untuk mendapatkan investor maka HPP juga belum memiliki keterlibatan untuk mendapatkan investor bagi pengrajin.

3.4 Fungsi Pemasaran

Suatu kelompok usaha harus dapat mengembangkan usaha anggota-anggotanya. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha adalah melalui pemasaran. Kelompok usaha dapat melakukan beberapa kegiatan seperti Perolehan Pembeli bukan lokal dan Keikutsertaan dalam Bazaar dan Pameran.

a. Perolehan Pembeli Luar Pangandaran

Produk-produk tersedia langsung di anggota. Oleh karena itu jika ada pembeli dari luar Pangandaran (bukan lokal) yang membeli dalam jumlah besar pada umumnya langsung menghubungi pengrajin yang bersangkutan. HPP tidak memiliki keterlibatan langsung dalam mendapatkan pembeli dari luar Pangandaran. Namun terdapat keterlibatan tidak langsung yaitu dari mengikutsertakan hasil anggota pada berbagai pameran dan bazaar. Keikutsertaan hasil kerajinan anggota ke dalam bazaar/pameran juga menarik pembeli dari luar Pangandaran walaupun akhirnya pesanan langsung dikirimkan ke anggota dan tidak melalui HPP.

b. Keikutsertaan Bazaar/Pameran

HPP terlibat dalam mengkoordinasi berbagai pameran dan bazaar. Tawaran tersebut biasanya berasal dari pemerintah ataupun pihak luar melalui KSPI. Ketika ada tawaran tersebut maka HPP akan memberitahukan

kepada seluruh anggota dan mengumpulkan hasil kerajinan seluruh anggota.

Keikutsertaan anggota HPP di dalam bazaar dan pameran yang ditawarkan pemerintah biasanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM. Hubungan kerja sama yang terjalin biasanya adalah pemerintah mengambil hasil kerajinan dari HPP, jika ada yang terjual maka Disperindag Kabupaten Ciamis akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada HPP.

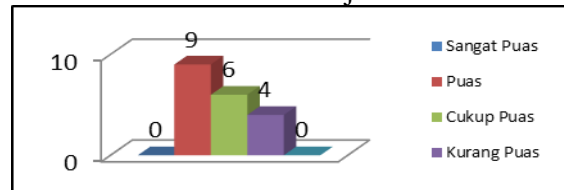
3.5 Fungsi Peningkatan Kapasitas

Kapasitas yang dimaksud termasuk dalam hal wawasan dan juga mengembangkan usaha mereka. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok usaha yaitu, pelatihan manajemen bisnis, inovasi produk, dan perluasan usaha.

a. Pelatihan Manajemen Bisnis

Pada tahun pertama (2007-2008), terdapat banyak beberapa pelatihan terkait manajemen bisnis kepada anggota. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh KSPI dengan koordinasi dengan HPP. HPP hanya mengkoordinasikan anggota untuk datang ke pelatihan saja. Berdasarkan kuesioner yang disebar, terdapat 19 orang (65,5 %) menyatakan mengikuti pelatihan yang dikoordinasikan oleh HPP. Namun terdapat 10 orang (34,5 %) yang tidak mengikutinya. Alasan mengapa sebagian besar anggota tidak datang ketika pelatihan adalah waktu yang kurang cocok dengan kegiatan lain.

Gambar 5
Tingkat Kepuasan Anggota dalam
Pelatihan Manajemen



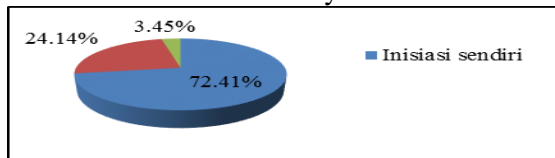
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Gambar 5 menunjukkan tingkat kepuasan anggota terhadap pelatihan yang dikoordinasikan oleh HPP. Berdasarkan hasil tersebut, mayoritas anggota cenderung menyatakan kepuasannya. Tidak ada diskriminasi dalam keikutsertaan pelatihan antara anggota korban dan anggota bukan korban. Seluruh anggota berhak untuk mengikuti pelatihan yang dikoordinasikan oleh HPP.

b. Inovasi Produk

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat permasalahan di antara anggota tentang hak cipta suatu produk yang baru diinovasikan oleh seorang pengrajin. Permasalahan produksi yang sering dikeluhkan terutama adalah terkait hak cipta dari produk yang dihasilkan. Perlu diketahui bahwa kerajinan merupakan karya yang sangat lekat dengan ide dan gagasan seseorang. Untuk membuat suatu produk yang baru dan inovatif menguras tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Sayangnya, ketika produk baru tersebut dijual sang pemilik ide dan laku terjual, maka pengrajin lain dengan mudahnya meniru produk tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut maka timbul rasa ketertutupan antar anggota untuk saling membicarakan inovasi produk selanjutnya yang dihasilkan. Bahkan timbul rasa *malas* untuk menghasilkan jenis produk dan modifikasi produk yang baru.

Gambar 6
Cara Terbentuknya Inovasi



Sumber: Hasil Analisis, 2010

HPP belum memiliki keterlibatan dalam inovasi yang dilakukan oleh anggotanya. Setiap anggota masih memiliki ego masing-masing yang tidak dapat dibendung. Padahal untuk bersama-sama membangun sebuah inovasi maka perlu kemauan untuk mentransfer pengetahuan. Selama sikap ini belum dilakukan maka HPP belum dapat terlibat apapun dalam inovasi produk.

c. Perluasan Usaha

HPP belum memberikan keterlibatan secara langsung dalam perluasan usaha anggota, baik dalam penambahan tempat berjualan (toko) maupun peningkatan jumlah produksi. Selama ini HPP hanya memberikan bantuan pinjaman. Namun pinjaman tersebut tergolong kecil, sehingga kurang membantu untuk proses produksi dan juga untuk pemasaran.

Selain itu, sebagian besar pengrajin di Pangandaran memang belum memiliki wawasan untuk mengembangkan usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Usaha kerajinan saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengusaha kerajinan juga bukan *risk takers* dan hanya menunggu kesempatan datang, bukan menjemput kesempatan. Pola pikir pengrajin ini harus diubah agar usaha kerajinan tidak berhenti di tempat dan maju.

Beberapa kompetitor seperti pengrajin kerajinan laut Jawa Timur dan Lampung merupakan kompetitor yang berat karena hasil laut yang dipakai oleh pengrajin di kedua tempat tersebut memang dihasilkan sendiri dari

tempat tersebut. Berbeda dengan pengrajin Pangandaran yang jarang memakai hasil laut Pangandaran dan masih mengambil bahan dari Jawa Timur pula. Keterbatasan ini mempuat daya saing produk kerajinan Pangandaran menjadi lebih lemah di pasar domestik.

Keterbatasan ini seharusnya tidak dapat mengucilkan arti kerajinan Pangandaran. Disinilah keterlibatan inovasi dan pemasaran seharusnya dilakukan oleh HPP. Ketika kedua ini mulai timbul di diri HPP maka perluasan usaha untuk anggota juga dapat berjalan dengan baik.

4. Pembelajaran dari Himpunan Pengrajin Pangandaran

Himpunan Pengrajin Pangandaran memang bukan kelompok usaha yang sudah lama terbentuk dan memiliki anggota yang besar. HPP adalah organisasi yang tergolong masih baru dan masih perlu perbaikan. Namun dari organisasi HPP, didapat pengalaman bagaimana melakukan kegiatan di kawasan pasca bencana.

a. Pentingnya Stimulus Pihak Luar dalam Pengorganisasian Kelompok

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pembentukan kelompok usaha yang dilakukan oleh KSPI merupakan langkah yang tepat. Hal ini disebabkan saat kondisi pasca bencana, setiap pelaku usaha akan memikirkan nasibnya dan usahanya sendiri. Hal ini sangat lumrah terjadi pada masyarakat pasca bencana. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dari pihak luar, dalam hal ini adalah KSPI, menstimulus gerakan masyarakat untuk bangkit bersama dari keterpurukan, terutama gerakan pelaku usaha kecil dan menengah.

b. Pentingnya Legalitas Kelompok

Berkaca dari beberapa kawasan pasca bencana, maka bantuan sering kali diberikan terutama

kepada kelompok-kelompok. Banyak kelompok-kelompok baru, baik kelompok masyarakat maupun kelompok usaha, yang didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan. Setelah bantuan diterima, kelompok tersebut langsung vakum dan bubar. Legalitas hukum menunjukkan keseriusan kelompok tersebut dalam menjalani fungsinya dan mempermudah untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah, dengan kata lain kelompok menjadi lebih dipercaya oleh pihak luar.

c. *Mandiri Secara Komprehensif*

Kemandirian komprehensif adalah bentuk kemandirian dimana HPP dapat *menjemput kesempatan* dan bukan *menunggu kesempatan*. Kesempatan yang dimaksud bukan hanya dalam hal finansial namun juga kesempatan mempererat organisasi, kesempatan meningkatkan produksi dan kesempatan memperluas pemasaran.

HPP saat ini sedang berusaha untuk mandiri agar bisa lepas dari KSPI. Padahal tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini. Sejak awal HPP adalah organisasi yang memang bebas. KSPI hanya membantu untuk pengorganisasian awal dan membekali mereka untuk dapat memulihkan usaha dengan kapasitas sendiri. KSPI membekali HPP dengan pelatihan manajemen, mengikutsertakan dalam pameran, memberikan pinjaman, menghubungkan HPP dengan pemerintah dan juga membuka akses ke pemerintah pusat dengan pesanan dari istana negara.

Namun saat ini HPP melihat kemandirian dari segi pembiayaan saja. HPP berusaha agar mendapat dana hibah yang dikelola oleh KSPI dari Tanoto Foundation. HPP beranggapan bahwa dengan pengelolaan dana sendiri, maka dana tersebut dapat berputar. Hal ini sebenarnya tidak salah, namun pengelolaan

dana di suatu organisasi memerlukan perhatian yang ketat. Dengan tingkat kemacetan kredit saat ini yang tinggi di HPP maka pengelolaan dana secara mandiri dirasa kurang tepat.

Perhatian HPP saat ini seharusnya adalah membuka jalur pemasaran yang baru dan bagaimana mereka dapat meningkatkan daya kompetitif dari pengrajin laut Jawa Timur dan Lampung. Kerajinan Pangandaran tidak boleh mengandalkan pasar lokal saja. Mereka harus memiliki pasar yang lebih luas. Pengrajin Jawa Timur dapat mengakses pasar di Bali namun Pangandaran sulit bersaing karena pemasok kerang mereka juga berasal dari Jawa Timur. Hal ini menyebabkan mereka kalah dari segi harga di pasar domestik.

d. *HPP dalam Fungsi Pengorganisasian*

Hal unik dalam HPP adalah anggotanya dapat digerakkan dalam berbagai kegiatan sosial dibandingkan kegiatan bisnis. Hal dapat dilihat dari tingginya partisipasi anggota dalam kegiatan opsi ataupun pertemuan anggota namun rendahnya koordinasi dalam peningkatan inovasi produk. Anggota HPP merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan yang bersifat santai, kekeluargaan dan kebersamaan.

Tingginya partisipasi anggota dalam penyusunan anggaran dasar dan pemilihan ketua merupakan hal yang baik karena dapat membuat rasa memiliki akan organisasi ini. Dengan keterlibatan tersebut maka anggota merasa menjadi bagian penting dari HPP dan memahami benar bagaimana keberjalanan HPP. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan-kegiatan HPP lainnya. Kebersamaan dalam kegiatan bisnis belum dapat digerakkan karena masing-masing anggota memiliki ego untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Terbukti dengan adanya

masalah hak cipta produk baru yang sering ditiru oleh pengrajin lain. Penyelesaian selama ini masih belum memuaskan banyak pihak sehingga setiap pengrajin menjalankan usahanya masing-masing.

e. HPP dalam Fungsi Pembiayaan

Keberadaan pihak luar sebagai stimulus ternyata membuat ketergantungan tersendiri bagi perkembangan HPP. Pengrajin Pangandaran sebagai pengusaha mikro membutuhkan suntikan modal agar dapat mengembangkan usahanya. Sumber dana tersebut sebenarnya tidak hanya dari KSPI. Banyak cara untuk mendapatkan dana. Namun selama ini HPP hanya mengandalkan KSPI sebagai sumber modal. Untuk mendapatkan kesempatan tersebut maka setiap anggota mencari secara masing-masing.

Keterlibatan HPP sebagai koordinator juga tidak berjalan dengan semestinya. Terdapat perbedaan kesepahaman antara HPP dengan KSPI. HPP mengatakan bahwa dana pinjaman diberikan langsung kepada anggota sehingga untuk penagihannya, KSPI diminta langsung menagih ke anggota. Namun menurut KSPI, uang tersebut dipinjamkan atas nama HPP sehingga pada dasarnya yang meminjam adalah organisasi, bukan individu.

Berkaca dari pengalaman tersebut, HPP belum menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan dana dari anggotanya. Tingkat kredit macet yang tinggi dari HPP merupakan cermin bahwa HPP belum dapat mengkoordinasikan anggotanya untuk membayar angsuran pinjaman. Pembelajaran dari ini adalah kelompok usaha mampu untuk mencari sumber dana secara aktif, tidak hanya mengandalkan satu sumber. Selain itu, kelompok usaha bukan hanya harus mampu dalam mengakomodasikan dana pinjaman tersebut namun juga dapat mendorong anggotanya

untuk membayar angsuran pengembalian pinjaman.

f. HPP dalam Fungsi Pemasaran

HPP juga belum dapat membuka pasar baru bagi kerajinan Pangandaran. Selama ini HPP masih bersifat menunggu tawaran mengikuti pameran dari pemerintah maupun KSPI. Keikutsertaan HPP dalam pameran pun masih hanya dilihat sebagai ajang menjual barang bukan sebagai ajang promosi. Padahal keikutsertaan hasil kerajinan Pangandaran dalam berbagai pameran seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, misal dengan penyebaran katalog dan pamflet selama pameran.

Dana pinjaman yang didapat dari KSPI selama ini tidak dapat dimanfaatkan secara baik. Padahal dengan dana tersebut seharusnya HPP dapat mengakses pasar baru bagi kerajinan Pangandaran. Kerajinan Pangandaran selama ini hanya mengandalkan pasar lokal sehingga volume produksi tidak dapat ditingkatkan. Pengurus bersama seluruh anggota seharusnya dapat menemukan strategi yang tepat untuk keluar dari belenggu ini.

g. HPP dalam Fungsi Peningkatan Kapasitas

Dalam fungsi ini, HPP hanya menjalankan koordinasi untuk pelatihan manajemen yang diselenggarakan oleh KSPI dan juga Disperindag. Pelatihan diberikan sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh pihak luar. HPP hanya sebagai pengkoordinir anggota untuk hadir ke pelatihan tersebut. HPP tidak dapat mengusulkan jenis pelatihan yang dibutuhkan kepada pemerintah ataupun KSPI karena pelaksanaannya akan sulit dilaksanakan terutama karena kendala pendanaan.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya HPP dapat mengadakan pelatihan ataupun *training* yang mereka butuhkan sendiri. Karena seringkali pelatihan yang diberikan bersifat

pengulangan dari apa yang telah diberikan pada beberapa waktu yang lalu. Untuk menyelenggarakan hal tersebut maka HPP dapat mencari sponsor dan donatur untuk membiayai pelaksanaan pelatihan tersebut.

h. HPP dalam Perencanaan

Kelompok merupakan bentuk perencanaan *bottom-up* yang memberdayakan masyarakat sehingga perencanaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil perencanaan pun dapat lebih tepat sasaran. Perencanaan sudah bukan hasil dari kalangan *elite* tertentu namun merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat dengan pihak pengambil keputusan. Pada kenyataannya hal tersebut belum terjadi. Kelompok dan pemerintah masih berjalan masing-masing sehingga perencanaan di Pangandaran dapat berjalan dengan sinergis.

Saat ini HPP masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Disinilah peran pemerintah seharusnya untuk lebih memberdayakan kelompok sebagai aset kesiapan terhadap bencana di kawasan rawan bencana, bukan hanya sebagai organisasi pengumpul massa. Kerja sama antara HPP dan pemerintah merupakan langkah tepat untuk menempatkan kelompok sebagai objek perencanaan di kemudian hari.

5. Penutup

HPP hanya memiliki fungsi dalam pengorganisasian, pembiayaan dan pemasaran dan pengembangan. Dalam fungsi pengorganisasian, HPP berlaku sebagai inisiator dan koordinator dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pertemuan anggota, operasi bersih, penyusunan anggaran dasar dan pemilihan ketua.

Dalam fungsi pembiayaan, HPP berlaku sebagai koordinator. Koordinator dalam pengajuan dan juga dalam pembagian dana pinjaman ke anggota. Walaupun HPP memainkan fungsinya namun anggota kurang puas terhadap dana pinjaman yang diberikan karena nilai yang diberikan sedikit dan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank. Dalam fungsi pemasaran, HPP berlaku sebagai koordinator. Kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran biasanya dilakukan oleh pihak luar dan HPP yang mengkoordinasikan anggota untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara dalam fungsi peningkatan kapabilitas, HPP berlaku sebagai koordinator pelatihan manajemen yang dilakukan oleh KSPI.

Selain fungsi Pengorganisasian, keterlibatan HPP dalam fungsi yang lain hanya menjadi penghubung antara pihak luar yang memiliki suatu program atau kegiatan terkait dengan pengrajin. Jika tidak ada pihak luar seperti KSPI ataupun Disperindag yang memberikan program atau kegiatan tersebut maka HPP tidak menjalankan kegiatan tersebut. Hal inilah yang membuat ketergantungan HPP yang tinggi terhadap KSPI dan Disperindag. Jika KSPI dan Disperindag tidak berfungsi lagi, maka HPP akan vakum perlahan-lahan.

Terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari HPP untuk mengembangkan kelompok usaha sebagai bentuk pemulihan usaha di kawasan pasca bencana. Adanya stimulus luar yang menginisiasi pembentukan HPP merupakan langkah tepat dalam proses pemulihan usaha yang cepat dan tepat. Namun, kelompok yang dibentuk harus diberi pembinaan agar mampu secara mandiri menjalankan fungsinya. Jangan sampai keberadaan stimulus luar itu menjadi benalu dan akhirnya membuat kelompok akhirnya menjadi organisasi pengumpul masa saja.

Tidak ada perbedaan nyata yang terlihat antara anggota yang menjadi korban bencana dan anggota yang bukan korban. Perbedaan hanya terbatas pada motivasi dan bagaimana cara mereka menjadi anggota. Tidak ada diskriminasi walaupun HPP belum memberikan perhatian dalam perkembangan usaha anggota bukan korban lebih dalam.

Sampai saat ini fungsi yang paling menonjol oleh HPP hanya terbatas pada pengorganisasian saja. Kuatnya pengorganisasian yang ada di HPP ini tidak diikuti dengan strategi pengembangan usaha dan kelompok yang baik. Dengan kata lain, kemauan untuk berkembang sudah ada namun belum ada langkah-langkah konkret yang dijalankan oleh HPP.

Kelompok merupakan bentuk perencanaan *bottom-up* yang memberdayakan masyarakat sehingga perencanaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil perencanaan pun dapat lebih tepat sasaran. Perencanaan sudah bukan hasil dari kalangan *elite* tertentu namun merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat dengan pihak pengambil keputusan. Pada kenyataannya hal tersebut belum terjadi. Kelompok dan pemerintah masih berjalan masing-masing sehingga perencanaan di Pangandaran dapat berjalan dengan sinergis.

Saat ini HPP seharusnya tidak terlalu memfokuskan diri bagaimana mendapatkan dana untuk dikelola secara mandiri namun fokusnya adalah untuk dapat meningkatkan daya kompetitif dan memperluas pasar dengan cara memulai mencari pemasok bahan baku selain Jawa Timur yang memiliki kualitas sama dan harga lebih murah agar secara harga dapat bersaing dengan pengrajin dari daerah lain. Bahkan jika perlu, dimulai pembudidayaan kerang di Kabupaten Ciamis

saat ini untuk menunjang keperluan pengrajin Pangandaran.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hastu Prabatmodjo, Ir., MS., Ph.D untuk arahan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat ditulis. Terima kasih juga kepada dua mitra bestari yang telah memberikan komentar yang berharga.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, Laila Kholid. 2007. *Maintaining Social Capital in the Post-Disaster Society: Yogyakarta Case* di dalam Proceeding International Seminar on Post – Disaster Reconstruction: Assistance to Local Governments and Communities. URDI: Yogyakarta.
- Hallberg, Kristin. 2000. *A Market-Oriented Strategy for Small and Medium Scale Enterprise*. World Bank.
- Himpunan Pengrajin Pangandaran. 2010. *Unibi Go HPP*. Dari <http://www.craft-pangandaran.blogspot.com>. Diakses 20 Juli 2010.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Rencana Aksi Tsunami Pangandaran*.
- Putnam, Rober. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and public Life in the American Prospect*. Springer:USA.
- Ratnasari, Dian. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Mikro sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan*. Dari <http://www.scribd.com/doc/18150366/Pemberdayaan-Ekonomi-Mikro-sebagai-Solusi-Mengatasi-Kemiskinan>. Diakses 5 Juli 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Tanoto Foundation. 2009. *Kerang Pangandaran di Ritz Carlton*. Dari <http://www.tanoto-foundation.or.id>. Diakses 30 Mei 2010.
- Warfield, C. 2007. *The Disaster Management Cycle*. Dalam Sutrisno. *Priorities in Social Economic Recovery towards Effective Disaster Rehabilitation Process*. Dalam Proceeding International Seminar on Post-Disaster Reconstruction: Assistance to Local Governments and Communities. URDI: Yogyakarta.